



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SADIRUN ANWAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**
3. NHK : **515679**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/72 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3800 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 26.425.183**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 714.425.183**III. HUTANG** Rp. 290.595.820**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 423.829.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.